

ANALISIS SIRKULASI KEPEMIMPINAN PARTAI GOLKAR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGGUNAKAN KONSEP INTRA-PARTY DEMOCRACY

Azwar Wijaya Syam¹, La Ode Efrianto², Wa Ode Lusianai³

Politeknik Informatika Nasional Makassar, azwarwijayasam@gmail.com, Makassar Indonesia

Universitas Halu Oleo, laode.efrianto@uho.ac.id, Kendari Indonesia

Universitas Halu Oleo, lusianaiwaode@uho.ac.id, Kendari Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses sirkulasi/seleksi kepemimpinan di internal Partai Golkar melalui Musyawarah Daerah (Musda) di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009. Penelitian ini berangkat dari tuntutan partai politik sebagai 'roh' demokrasi agar dapat berdemokrasi dari dalam terlebih dahulu. Sebab, bagaimana mungkin sebuah partai politik dapat mengawal demokrasi jika mereka sendiri tidak demokratis terlebih dahulu. Partai Golkar kemudian dianggap lebih menarik untuk dikaji karena Golkar merupakan salah satu contoh partai besar yang telah melakukan transformasi dari dalam menuju kearah yang lebih demokratis dalam hal seleksi kepemimpinan partai. Penelitian ini melihat terlebih dahulu bagaimana pola seleksi kepemimpinan Golkar di era Orde Baru kemudian membandingkan dengan Golkar Era reformasi, lalu setelah itu barulah dilihat seleksi kepemimpinan Golkar di tingkat daerah dalam hal ini Partai Golkar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerangka yang digunakan untuk memahami lebih dalam proses seleksi kepemimpinan partai Golkar adalah Intra-Party Democracy. Melalui kerangka Intra-Party Democracy, Susan Scarrow memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menentukan sejauh mana proses demokratisasi itu berjalan. Seperti, siapa yang dipilih, siapa yang memilih dan bagaimana mekanisme pemilihan?

Menggunakan kerangka analisis Intra-Party Democracy dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa temuan. *Pertama*, secara procedural proses seleksi kepemimpinan partai Golkar melalui Musda 2009 berjalan demokratis. Mekanisme-mekanisme partai yang menjadi aturan main dalam Musda dilaksanakan dengan baik oleh para kandidat dalam hal ini Gandung Pardiman dan Rahmad Pribadi serta para pemegang hak suara. *Kedua*, kemenangan Gandung Pardiman dengan meraih suara dominan dalam Musda tidak terlepas dari pengalaman organisasi politisi senior tersebut serta kekuatan finansial. *Ketiga*, penelitian ini menemukan adanya indikasi praktek money politic serta factor kedekatan dengan Sultan Hamengkubuwono X sebagai sesepuh internal Golkar. Selain factor prestasi dan pengalaman tidak bisa dipungkiri kemudian adanya praktek money politic dalam bentuk *Club Goods*. Namun, kemenangan Gandung Pardiman sebagai sosok politisi senior dan juga pengaruh Sultan ternyata tidak mampu untuk mengangkat suara Golkar DIY dalam kontestasi politik.

Kata kunci: Intra-Party Democracy, Partai Golkar, Seleksi Kepemimpinan, dan Musda

Abstract

This study analyzes the process of circulation / leadership selection within the Golkar Party through the Regional Deliberation (Musda) in the Special Region of Yogyakarta in 2009. This research departs from the demands of political parties as the 'spirit' of democracy so that they can be democratic from within first. Because, how could a political party be able to guard democracy if they themselves were not democratic first. The Golkar Party is then considered more interesting to study because Golkar is an example of a large party that has carried out a transformation from within towards a more democratic one in terms of party leadership selection. This research first looks at how the Golkar leadership selection pattern in the New Order era compares with the Golkar Reform era, then after that, we will see the Golkar leadership selection at the regional level, in this case the Golkar Party in the Special Region of Yogyakarta. The framework used to understand more deeply the leadership selection process for the Golkar party is Intra-Party Democracy. Through the framework of Intra-Party Democracy, Susan Scarrow poses several questions that determine the extent to which the democratization process goes. Like, who is elected, who will vote and what is the election mechanism?

Using an analysis framework of Intra-Party Democracy and a qualitative approach, this study found several findings. First, procedurally the leadership selection process for the Golkar party through the 2009 Musda was democratic. The candidates, in this case Gandung Pardiman and Rahmad Pribadi, have implemented the party mechanisms that rule the game in Musda, as well as voting rights holders. Second, Gandung Pardiman's victory by gaining a dominant vote in the Musda cannot be separated from the experience of the senior politician's organization and financial strength. Third, this study found an indication of the practice of money politics and a factor of closeness to Sultan Hamengkubuwono X as the internal elder of Golkar. In addition to the factors of achievement and experience, it cannot be denied that the practice of money politics in the form of Club Goods. However, the victory of Gandung Pardiman as a senior politician and also the influence of the Sultan was unable to raise the voice of Golkar DIY in political contestation.

Keywords: *Intra-Party Democracy, Golkar Party, Leadership Selection, and Musda*

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji proses demokratisasi internal DPD Partai Golkar di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Musyawarah daerah (Musda) partai. Sebelum melihat proses seleksi kepemimpinan dalam Musda, penelitian ini melihat proses seleksi kepemimpinan di tingkat pusat melalui Musyawarah Nasional (Munas) sebagai pintu masuk. Sebab, proses atau dinamika yang terjadi di tingkat pusat sedikit banyaknya kemudian mempengaruhi apa yang terjadi di daerah. Kajian ini akan focus pada DPD Partai Golkar di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan melihat

sirkulasi/seleksi kepemimpinan melalui Musda DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Ramlan Surbakti dalam Seri Demokrasi Elektoral, setidaknya terdapat dua alasan urgensi pembahasan tema mengenai demokratisasi partai politik secara internal (*intra-party democracy*) (Ramlan, 2013, p. 1).

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menugaskan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (Pasal 22E ayat (3)) dan yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Pasal 6). Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga menugaskan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan posisinya sebagai peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, partai politiklah yang menentukan siapa yang menjadi calon anggota DPR dan DPRD dan mengarahkan para kadernya di DPR dan DPRD dalam membuat keputusan tentang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Partai politik pula yang mendengarkan, menampung, dan memperjuangkan aspirasi rakyat” atau melaksanakan fungsi representasi politik. Dengan serangkaian kewenangan yang dimilikinya, partai politik menentukan siapa yang menjadi penyelenggara negara, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif tingkat nasional maupun daerah. Itulah sebabnya mengapa partai politik peserta Pemilu digambarkan sebagai pintu masuk untuk jabatan politik”.

Kedua, partai politik merupakan komponen dan aktor utama sistem politik demokrasi baik, sebagai peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan yang mengusulkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maupun sebagai “jembatan” antara rakyat dengan negara. Partai politik disebut sebagai jembatan antara rakyat dengan Negara karena partai politik melaksanakan peran sebagai representasi politik rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat dan memperjuangkannya menjadi bagian dari kebijakan publik.

Kedua hal itulah yang menyebabkan partai politik tidak saja sebagai badan publik, tetapi juga komponen dan aktor utama demokrasi. Karena menjadi badan publik dengan dua peran demokrasi tersebut, wajarlah mempertanyakan apakah partai politik secara internal telah dikelola berdasarkan prinsip dan metode demokrasi. Bagaimana mungkin partai politik berperan sebagai pelaku demokrasi secara eksternal kalau secara internal partai politik tidak dikelola secara demokrasi.

DPD Golkar DIY kemudian dipilih karena memiliki persoalan unik tersendiri, yaitu Golkar DIY yang notabene memiliki sosok Sultan sebagai figure yang sangat berpengaruh ternyata tidak dapat membantu mengangkat elektabilitas Golkar sehingga suara Golkar dalam Pileg 1998, 2004 dan 2009 secara konsisten menurun. Ditambah lagi dengan kehadiran sosok Gandung Pardiman sebagai politisi senior dan berpengalaman ternyata juga tidak mampu mengangkat suara Golkar, ironinya kepemimpinan Gandung selama dua kali pada periode 2004 dan 2009 juga tidak dapat mengangkat suara Golkar. Disinilah letak keunikan Golkar DIY, untuk melihat bagaimana proses seleksi kepemimpinan itu berjalan yang pada hasilnya tidak dapat memenangkan pileg bahkan membuat elektabilitas Golkar semakin jatuh. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana proses seleksi kepemimpinan yang berjalan di internal Golkar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai instrument akademik untuk mengungkap masalah penelitian. Beberapa kriteria penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif. Pertama, studi ini mengkonstruksi sebuah realitas di dalam konteks kehidupan demokrasi internal partai Golkar pada pemilihan Ketua (Musda) di tingkat lokal. Selain itu sebagaimana menjadi ciri penelitian kualitatif, konsep-konsep yang ada dalam penelitian ini tidak disusun dalam bentuk variabel-variabel yang jelas sebagaimana lazimnya dalam penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kata-kata atau narasi dari dokumen, observasi ataupun transkrip, bukan berbentuk angka-angka hasil pengukuran. Peran teori dalam penelitian ini sebagai sudut pandang untuk memandu alur penelitian, karena

penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan logika induktif. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir temuan - temuan sehingga menghasilkan gambaran sebab-sebab terpilihnya kandidat seorang calon Ketua Partai Golkar di tingkat local berdasarkan nilai-nilai dan kekuatan politik yang dimilikinya.

Jika dilihat dari tujuan penelitian, penelitian ini bersifat eksplanatori (*Explanatory Research*), dengan sejumlah alasan. Pertama, dilihat dari sisi latar belakang masalah penelitian, penelitian yang bersifat ekplanatori didasari hasrat untuk mengetahui “bagaimana” atau menjelaskan mengenai gambaran demokrasi internal di dalam partai Golkar dengan melihat sebab-sebab seorang kandidat Ketua Umum terpilih. Studi ini berangkat dari keinginan untuk mengetahui lebih jauh “*Bagaimana Proses Seleksi Kepemimpinan Pada Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009?*”. Dilihat dari jenis studi kasusnya, studi ini merupakan bersifat analisis studi kasus karena studi ini menjadikan proses pemilihan Ketua Partai Golkar tingkat local pada Musda sebagai sarana untuk memahami demokratisasi yang terjadi di dalam internal partai Golkar. Unit analisis studi ini adalah kekuatan dan modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Intra-Party Democracy Dalam Musda Partai Golkar Diy Tahun 2009

Pada bab ini akan membahas mengenai sejauh mana proses Intra-Party Democracy Partai Golongan Karya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejauh mana proses demokratisasi internal Partai Golkar ini akan dilihat khususnya dalam proses seleksi kepemimpinan Partai Golkar melalui Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar tahun 2009. Diskusi pada bagian ini akan focus melihat proses seleksi kepemimpinan internal Partai Golkar dengan menganalisis kontestasi para calon ketua, mekanisme pemilihan, aturan main dalam Musda serta factor keterpilihan ketua Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009. Pembagian sub-bab dalam Bab ini kemudian mengkerangkai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Susan Scarrow mengenai Seleksi Kepemimpinan Internal Partai. Tiga konsep besar

yang terkandung dalam pertanyaan tersebut adalah mengenai siapa calon yang dipilih, siapa yang memilih dan bagaimana aturan main dalam seleksi kepemimpinan tersebut. Sehingga dengan menggunakan kerangka analisis ini, maka dapat dilihat sejauhmana proses mekanisme yang berlangsung dalam seleksi kepemimpinan di internal Partai Golkar DIY tahun 2009.

Pertarungan Sang Petahana dengan Kader Muda dalam Musda Golkar DIY tahun 2009

Sosok petahan Gandung Pardiman merupakan figure yang sangat berpengaruh di DIY khususnya di internal Partai Golkar DIY. DRS. H pardiman, lahir di Bantul pada tanggal 25 Februari 1953 ini adalah salah satu politikus Golkar yang kaya akan pengalaman politik. Menjadi Wakil Ketua DPRD Golkar DIY dan kemudian menjadi legislator DPR RI dapil DIY. Perjalanan organisasi GP terbilang mulus sampai pada akhirnya menjadi Ketua Golkar DIY. 1985 sebagai Ketua PPM Kabupaten Gunung Kidul, 1989 Ketua bagian PP DPD II Golkar Kabupaten Gunung Kidul, 1996 sebagai Ketua DPD KUKMI DIY, 2002 sebagai Ketua Ormas MKRG, 2004 dan 2009 terpilih sebagai Ketua DPD I Golkar DIY. Dari perjalanan Organisasi GP terlihat bahwasanya GP adalah kader Golkar yang merayap dari bawah sampai akhirnya berhasil menjadi Ketua Golkar DIY. Sehingga tidak lagi diragukan kapasitas GP sebagai kader Golkar.

Gandung Pardiman adalah mantan kepala sekolah di SMP Kartika V pojong Gunung Kidul juga sebagai salah satu staff pengajar di IKIP Veteran Yogyakarta. Selain di bidang pekerjaan formal Gandung juga adalah seorang direktur di salah satu perusahaan yaitu CV Agro Hura Buntani. Dalam dunia politik, Gandung adalah mantan wakil ketua di DPRD DIY dan juga mantan legislator DPR RI. Berdasarkan perjalanan karir Gandung inilah maka tidak heran jika Gandung sendiri kuat dalam hal finansial. Yang dimana kekuatan finansial Gandung inilah yang menjadi salah satu modal utama dalam melancarkan keterpilihannya di Musda Golkar DIY 2004 dan 2009.

Melihat riwayat organisasi dan karir pekerjaan (baik dibidang formal, swasta maupun politik) Gandung Pardiman, tidak salah jika Gandung merupakan figur kuat baik secara prestasi maupun finansial. Pengalaman organisasi Gandung membuatnya tidak sulit dalam menjalankan roda organisasi Partai Golkar. Tidak mudah memimpin sebuah Partai dalam skala Provinsi jika tidak memiliki pengalaman organisasi yang matang, apalagi untuk bisa membawa Partai tersebut mengalami pelonjakan suara. Prestasi itulah yang kemudian dilakukan oleh Gandung Pardiman, membawa Golkar DIY menjadi lebih baik dan meningkat perolehan suara dalam pileg 2009. Pengalaman karir pekerjaan (baik dibidang formal, swasta maupun politik) Gandung Pardiman menjadikannya kemudian kuat dalam persolan finansial. Hal ini juga sangat penting dalam menjalankan Partai Politik sehari-hari mengingat pembiayaan partai dari pemerintah sangatlah minim sehingga penting untuk mendapat bantuan finansial dari kader-kader Partai.

Dalam Musda DIY 2009 Gandung Pardiman berhadapan akan berkontestasi melawan kader muda Rahmad Pribadi. Rahmad Pribadi yang lahir pada 13-April-1970 adalah sosok Putra Daerah Yogyakarta yang berhasil menyelesaikan study sarjana S1 dan S2 di Universitas Texas Amerikas Serikat dan Harvard University. Perjalanan organisasi Rahmad Pribadi juga terbilang cukup berpengalaman di tingkat nasional salah satunya sebagai Ketua DPP AMPI tahun 2009-2015, bendahara umum Karang Taruna ditingkat nasional tahun 2010-2015 dan Wakil Ketua umum barisan Muda Kosgoro. Namun di bidang bisnis boleh dibilang rahmad Pribadi lebih menonjol. Dengan karakter Low Profile, tidak banyak sorotan publikasi mengenai prestasinya. Namun dalam dunia bisnis, banyak perusahaan multi-nasional dan nasional yang menginginkan pemikiran serta profesionalismenya. Salah satunya di Indonesia Caltex Indonesia dan salah satu perusahaan milik konglomerat Indonesia Aburizal Bakrie di bidang Pertambangan dan Migas, posisi sebagai CEO dan Direktur adalah posisi tertinggi dalam perusahaan tersebut. Rahmad Pribadi juga mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas.

Faktor Keterpilihan Gandung Pardiman

Gandung Pardiman adalah sosok yang paling berpengaruh dalam peningkataperolehan suara Golkar dalam pileg 2009 di DaerahIstimewaYogyakarta. Sosok politisi senior ini menjadi figure sentral dalam perjalanan Golkar di Yogyakarta pada khususnya. Gandung Pardiman berhasil menjadi pemenang dalam seleksi kepemimpinan Golkar di DIY dengan mengalahkan kader Muda Rahmad Pribadi. Factor kemenangan Gandung Pardiman adalah karena track record, pengalaman organisasi dan prestasi selain juga adalah factor money politic. Berikutakan di jelaskan lebih elaborative mengenai factor keterpilihan Gandung Pardiman:

1. Pengalaman Organisasi, Track Record dan “Loyalitas” Musda partai Golkar DIY tahun 2009 menjadi ajang pembuktian atas dominasi politisi Gandung Pardiman di internal Golkar DIY. Terpilihnya kembali Gandung Pardiman sebagai Ketua Golkar DIY tahun 2009 pengalaman dalam kepengurusan menjadi penting. dan Kepercayaan akan sosok Gandung Pardiman membuat kader-kader Golkar berencana untuk kembali mencalonkan Gandung Pardiman dalam Musda ke-IX Golkar DIY yang akan dilaksanakan setelah Munaslub Golkar 2016 mendatang. Apabila hal ini benar disetujui oleh DPP Golkar maka Gandung Pardiman bukan tidak mungkin akan menjadi Ketua Golkar DIY untuk ketiga kalinya. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh tinggi Gandung dalam perjalanan Golkar DIY saat ini. Adapun “loyalitas” menurut penulis yang dimaksudkan disini adalah bagaimana Gandung Pardiman memberikan bantuan bahkan sejumlah dana baik kepada konstituen serta kepada pengurus partai Golkar. Dengan modal „loyalitas ini Gandung Pardiman akan tetap dan selalu menjadi pilihan utama bagi anggota partai.

2. Praktek Money Politic dan Kedekatan dengan petinggi Partai

Penelitian ini melihat adanya indikasi yang money politic yang dilakukan oleh Gandung Pardiman sebagai petahana dalam pertarungan perebutan ketua Golkar DIY. Akan tetapi, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya hanya sedikit dari pada politisi pelaku money politic dalam mendulang suara yang kemudian mengakui tindakannya sebagai money politik bahkan tidak ada satupun. Melainkan sebagai bantuan serta bentuk beramal yang dilakukan oleh politisi sebagai rasa terima kasih kepada konstituennya. Pun demikian dengan Gandung Pardiman, apa yang dilakukannya menurutnya hanya sebagai bentuk beramal dan membantu konstituennya bukan sebagai bentuk money politic.

Ada beberapa variasi bentuk money politic/patronase, diantaranya pembelian suara (vote buying), pemberian-pemberian pribadi (individual gifts), pelayanan dan aktivitas (services and activities), barang-barang kelompok (club goods) dan proyek-proyek gentong babi (pork barrel projects) (Edward & Mada, 2015, p. 22). Bentuk-bentuk diatas biasanya yang menonjol dan dianggap sebagai money politic oleh kebanyakan masyarakat maupun sebagian politisi adalah pembelian suara (vote buying) karena ini jelas terjadi pertukaran uang/materi secara langsung kepada pemilih/pemegang hak suara. Sementara variasi bentuk seperti barang-barang kelompok umumnya dianggap sebagai bentuk beramal dan membantu konstituen yang telah memilihnya sebelumnya.

Pardiman factor praktek money politic kemudian menjadi salah satu penentu. Gandung Pardiman tidak memberikan secara langsung materi kepada pemegang hak suara melainkan dengan memberikan barang-barang kelompok (club goods) kepada masyarakat. Gandung Pardiman melakukan salah satu variasi bentuk money politic yaitu club goods. Ini kemudian oleh sebagian kader-kader Golkar DIY dianggap sebagai bentuk loyalitas serta bantuan kepada masyarakat. Sehingga dari praktek money politic semacam ini, muncul simpati dari beberapa kader kepada Gandung

Pardiman kemudian DPD-DPD se-DIY yang merasa telah terbantuan masyarakatnya oleh Gandung Pardiman merasa sangat beresalah jika dalam proses seleksi kepemimpinan tidak memilih Gandung Pardiman.

Sultan dan Golkar adalah satu kesatuan yang sangat sulit untuk dipisahkan karena selain memiliki nilai historis yang dalam juga bagi Sultan Golkar memiliki ikatan batin yang kuat dengan beliau. Gandung Pardiman akan tetap mendapat dukungan dari Sultan meskipun “secara formalitas” Sultan Hamengkubuwono X. Kata „formalitas“ yang disampaikan Gandung Pardiman menjelaskan bahwasanya dibelakang layar/*behind the scene* Sultan tetap ada dan tetap memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan Golkar DIY termasuk dalam hal seleksi kepemimpinan. Dimana Musda 2009 yang lalu Sultan jelas belum „bercerai“ dengan Golkar sehingga sangat mungkin untuk sangat menonjol secara pengaruh dalam seleksi kepemimpinan Golkar DIY tahun 2009.

Meskipun Gandung Pardiman merupakan sosok kuat di internal Golkar yang kemudian ditopang oleh kekuatan Sultan sebagai sesepuh di Internal Golkar pula, namun keadaan itu tidak mampu mengangkat suara Golkar dalam Pileg. Yang terjadi kemudian adalah suara Golkar semakin menurun dari Pileg 1999 sekitar 14,34%, tahun 2004 sekitar 13,87% dan pada tahun 2009 menurun hingga 10,29%.

KESIMPULAN

Di tingkat local, berdasarkan hasil penelitian proses pemilihan Ketua Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta dengan studi kasus pada MUSDA Golkar DIY tahun 2009 dapat ditarik kesimpulan secara fakta empiris dan teoritis. Secara fakta empiris menunjukkan bahwa proses seleksi kepemimpinan partai Golkar di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Musda tahun 2009 berjalan demokratis secara prosedural. Selain syarat umum yang diberikan oleh partai yaitu berprestasi, berdedikasi, loyal, serta tidak tercela maka factor utama dalam kemenangan Gandung Pardiman adalah pengalaman organisasi, track record serta kekuatan finansial. Selain dari factor-faktor yang bersifat normative tersebut, penelitian ini juga melihat adanya pola *behind the*

scene yang berjalan. Pola tersebut adalah praktek money politic dan juga factor kedekatan dengan Sultan Hamengkubowono X sebagai sesepuh Golkar yang sangat berpengaruh baik di internal Golkar secara khusus dan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum

Meskipun demikian, Gandung Pardiman yang kembali terpilih atas berbagai factor tersebut ternyata tetap tidak mampu mengangkat suara partai Golkar DIY dalam Pileg. Pengaruh Sultan sebagai sosok yang paling berpengaruh di DIY juga ternyata tetap tidak bisa menjadi „mendongkrak“ suara Golkar sehingga terjadi penurunan dari Pileg 1999, 2004 dan 2009 secara kontinyu. Dari fenomena merosotnya suara Golkar ini kemudian tidak nampak apa yang dikatakan oleh Susan Scarrow yaitu proses IPD pada akhirnya melahirkan pemimpin yang dapat memenangkan partainya dalam kompetisi politik. Terpilihnya Gandung ternyata tidak cukup untuk memberikan kemenangan bagi Golkar dalam pileg, sehingga dapat dikatakan bahwasanya proses demokratisasi didalam seleksi kepemimpinan Golkar tidak berjalan dengan baik meskipun ada proses-proses yang terlihat seakan berjalan demokratis.

Bentuk money politik yang dipraktekkan oleh gandung Pardiman dalam memenangkan seleksi kepemimpinan Golkar adalah dalam bentuk barang-barang kelompok (*club goods*). Pola seperti biasanya hanya dianggap sebagai bentuk amal serta bantuan dari politisi kepada konstituennya sehingga sangat kurang bahkan tidak ada politisi yang menganggap ini sebagai praktek money politic. Begitupun dengan Gandung Pardiman, apa yang dilakukan dalam memberikan bibit tanaman serta perbaikan fasilitas-fasilitas umum di daerah hanya dianggap sebagai bentuk amal bantuan semata. Begitupun dengan kedekatannya dengan Sultan, posisi Sultan sebagai sesepuh dalam Golkar sangat memungkinkan adanya pengaruh dalam proses seleksi kepemimpinan Golkar DIY. Gandung Pardiman yang memiliki segudang pengalaman organisasi sebagai politisi senior dan juga prestasi yang baik dalam membawa Golkar memperoleh suara yang lebih banyak dalam Pileg ternyata juga

tidak lepas dari praktek money politic untuk memastikan diri sebagai Ketua Golkar DIY.

Susan Scarrow telah menyebutkan bahwasanya proses demokrasi internal partai pada tingkat praktisnya akan melahirkan pemimpin yang dapat memenangkan partainya dalam kompetisi politik. Namun, yang terjadi di Golkar adalah keterpilihan Gandung Pardiman bahkan hadirnya Sultan hanya membuat Golkar DIY menurun secara konsisten pada Pileg 2004 dan 2009. Artinya, dengan mengacu pada konsep Susan Scarrow proses seleksi kepemimpinan Golkar DIY memiliki masalah dalam implementasi demokrasi partai. Mungkin, secara procedural ada mekanisme demokratis dalam hal keterlibatan anggota partai dalam musyawarah partai namun dalam proses seleksinya memiliki kejanggalan-kejanggalan yang membuat proses tersebut tidak dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T. (2007). *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Alan, W. (1996). *Political Parties and Party Systems*. New York: Oxford University Press.
- Augustur. (2016, April 18). Musda Golkar DIY 2009. (W. S. Azwar, Pewawancara)
- Detiknews. (2009, November 30). *Gandung dan Rahmad Pribadi Bersaing Ketat Rebut Ketua Golkar DIY*. Dipetik April 28, 2016, dari Detik News: <http://news.detik.com/berita/1251243/gandung-dan-rahmad-pribadi-bersaing-ketat-rebut-ketua-golkar-diy%20diakses%20pada%2029-april-2016>
- Edward, A., & Mada, S. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Erwin, N. (2016, April 07). Musda Golkar DIY 2009. (W. S. Azwar, Pewawancara)
- Irsyad, S. (1998). *Partai Golkar Menatap Masa Depan*. Depok: Yappindo Press.
- Jhon, S. K. (2016, Maret 04). Musda Golkar DIY 2009. (W. S. Azwar, Pewawancara)
- Made. (2009, November 27). *Kubu Rahmad Pribadi Semakin Usik Kubu Gandung*. Dipetik 04 29, 2016, dari Kompas.com: <http://regional.kompas.com/read/2009/11/27/20195545/kubu.rahmad.pribadi.semakin.usik.kubu.gandung>

- Marsiono. (2016, April 7). Musda Golkar DIY 2009. (W. S. Azwar, Pewawancara)
- Pardiman, G. (2016, April 15). Musda Golkar DIY 2009. (W. S. Azwar, Pewawancara)
- Ramlan, S. (2013). *Mendorong Demokratisasi Internal Partai*. Jakarta: Kemitraan.
- Scarrow, S. (2005). Political Parties And Democracy In Theoretical And Practical Perspective: Implementing Intra-Party Democracy. *National Democratic Institute*, 10